

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Kota Magelang menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031. Pemerintah Kota Magelang dalam menimbang hal tersebut menggunakan dasar yakni dengan mengingat pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah selain mengingat pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga mengingat antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

Pemerintah Kota Magelang selanjutnya berdasarkan hal tersebut dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Magelang dan Walikota Magelang memutuskan untuk menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 didalamnya mengatur mengenai kawasan lindung. Berdasarkan Pasal 1 ayat (28) yang dimaksud dengan kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Pasal 46 huruf b menyebutkan bahwa kawasan lindung yang dimaksud adalah kawasan perlindungan setempat. Pasal 48 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa kawasan perlindungan setempat yang dimaksud berupa sempadan irigasi. Pasal 48 ayat (5) huruf b mengatur bahwa bangunan di sepanjang sempadan irigasi yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan irigasi tidak diijinkan untuk didirikan, namun pada kenyataannya masyarakat di Kota Magelang masih banyak yang melanggar aturan tersebut dengan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi. Pasal 84 ayat (1) huruf e juga mengatur mengenai ketentuan umum kegiatan kawasan perlindungan setempat yang berupa sempadan irigasi, dimana bangunan selain fasilitas infrastruktur tertentu/perkotaan dan RTH; jalan inspeksi dan lalu lintas umum; penunjang fungsi taman rekreasi dan RTH; dan bangunan irigasi dilarang untuk didirikan. Selanjutnya, pada Pasal 107 ayat (2) juga menerangkan bahwa pelanggaran yang berupa pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota akan

diberi sanksi administratif berupa : (a) peringatan tertulis; (b) penghentian sementara kegiatan; (c) penghentian sementara pelayanan umum; (d) penutupan lokasi; (e) pembongkaran bangunan; (f) pemulihan fungsi ruang; dan (g) denda administratif. Dengan demikian apabila ketentuan tersebut benar-benar dilaksanakan dengan baik, seharusnya kawasan sempadan irigasi bersih dari bangunan-bangunan milik warga yang berupa rumah tinggal dan sebagainya, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak terdapat bangunan antara lain rumah warga yang berdiri di sepanjang sempadan irigasi.

Penulis melakukan wawancara dengan seorang informan di Kantor perwakilan Balai Wilayah Progo, pada hari Jumat, tanggal 11 November 2016 pukul 8.00 WIB. Berdasarkan wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa di Magelang terdapat lima sungai yang meliputi Sungai Elo, Sungai Progo, Sungai Progo-Manggis (Kali Manggis), Kali Bening, dan Saluran Kali Kota. Batas Sungai Progo yaitu dimulai dari Jumprit, Kabupaten Temanggung sampai dengan perbatasan Yogyakarta. Kemudian, batas Sungai Elo yaitu dimulai dari Grabag, Kabupaten Magelang sampai dengan perbatasan Borobudur. Sungai Elo dan Sungai Progo berada di Kabupaten Magelang, sedangkan yang melintas di Kota Magelang antara lain yaitu Kali Bening, Kali Manggis, dan Saluran Kali Kota. Kali Bening yang melintasi Kota Magelang dimulai dari Kelurahan Kramat Kecamatan Magelang Utara hingga Kelurahan Jurangombo Kecamatan Magelang Selatan. Kali Manggis yang melintasi Kota Magelang dimulai dari

Kelurahan Kramat Kecamatan Magelang Utara hingga Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan. Saluran Kali Kota dimulai dari Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara hingga Kelurahan Jurangombo Kecamatan Magelang Selatan. Kali Bening dan Kali Manggis merupakan saluran irigasi primer, sedangkan Saluran Kali Kota merupakan saluran irigasi sekunder. Adanya masyarakat yang mendirikan bangunan liar dan tinggal di sepanjang sempadan saluran irigasi tersebut, dapat memberikan berbagai dampak negatif seperti mencemari air, mengganggu keindahan, dan melanggar ketertiban. Masyarakat masih banyak yang memiliki bangunan di sepanjang sempadan saluran irigasi Kota Magelang dan melanggar peraturan yang telah dibuat, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1, tabel 1.2, dan tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.1

Data Terindikasi Pelanggaran Pasal 48 Ayat (5) Huruf B dan Pasal 84 Ayat (1) Huruf E di Kali Kota Magelang

No.	Jenis Pelanggaran	Lokasi Pelanggaran		Jumlah Bangunan
		Kelurahan	Kecamatan	
1.	Pelanggaran garis sempadan saluran irigasi Kali Kota	Kedungsari	Magelang Utara	33
2.	Pelanggaran garis sempadan saluran irigasi Kali Kota	Potrobangsari	Magelang Utara	76
3.	Pelanggaran garis sempadan saluran irigasi Kali Kota	Magelang	Magelang Tengah	38
4.	Pelanggaran garis sempadan saluran irigasi Kali Kota	Cacaban	Magelang Tengah	3
5.	Pelanggaran garis sempadan saluran irigasi Kali Kota	Kemirirejo	Magelang Tengah	78
6.	Pelanggaran garis sempadan saluran irigasi Kali Kota	Jurangombo Utara	Magelang Tengah	28

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

Tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa jumlah bangunan terbanyak yang melanggar garis sempadan Kali Kota terdapat di Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah dengan jumlah sebanyak 78 bangunan. Jumlah bangunan yang paling sedikit melanggar garis sempadan Kali Kota terdapat di Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah dengan jumlah sebanyak 3 bangunan.

Tabel 1.2

Data Pelanggaran Pasal 48 Ayat (5) Huruf B dan Pasal 84 Ayat (1) Huruf E di Kali Bening Kota Magelang

No.	Kecamatan	Jumlah Bangunan
1.	Magelang Utara	-
2.	Magelang Tengah	6
3.	Magelang Selatan	-

Sumber: Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Perwakilan Balai Wilayah Progo

Tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terbanyak di sempadan irigasi Kali Bening yang melintasi Kota Magelang terjadi pada Kecamatan Magelang Tengah dengan jumlah 6 bangunan. Kecamatan Magelang Utara dan Kecamatan Magelang Selatan tidak terdapat bangunan yang melanggar.

Tabel 1.3

Data Pelanggaran Pasal 48 Ayat (5) Huruf B dan Pasal 84 Ayat (1) Huruf E di Kali Manggis Kota Magelang

No.	Kecamatan	Jumlah Bangunan
1.	Magelang Utara	33
2.	Magelang Tengah	-
3.	Magelang Selatan	-

Sumber: Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Perwakilan Balai Wilayah Progo

Tabel 1.3 tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terbanyak di sempadan irigasi Kali Manggis yang melintas di Kota Magelang terdapat pada Kecamatan Magelang Utara dengan jumlah 33 bangunan, sedangkan di Kecamatan Magelang Tengah dan Kecamatan Magelang Selatan tidak terdapat bangunan yang melanggar.

Pemerintah belum menunjukkan adanya tindakan tegas berupa pengusiran masyarakat yang mendirikan bangunan di sepanjang sempadan

irigasi dan pembongkaran semua bangunan yang berada di sempadan irigasi tersebut, dimana mereka menempati lahan irigasi atau pengairan.

Van Meter dan Van Horn, serta Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier mengungkapkan mengenai teori model implementasi. Menurut pendapat mereka, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sesuai dengan yang diungkapkan oleh para ahli tersebut diantaranya ialah kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik; serta karakteristik masalah kebijakan. Faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik perlu diperhatikan karena lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. Karakteristik masalah mencakup antara lain, yang pertama ialah tingkat kesulitan teknis, dimana terdapat masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan, namun ada juga masalah sosial yang sulit dipecahkan seperti kemiskinan; dan yang kedua ialah tingkat kemajemukan kelompok sasaran, yang artinya suatu kebijakan akan lebih mudah dilaksanakan apabila kelompok sasarannya homogen.

Latar belakang tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 yang di dalamnya memuat aturan tentang kawasan perlindungan setempat berupa sempadan irigasi dimana ada larangan mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan di sempadan irigasi bertujuan untuk mewujudkan

Kota Magelang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum diimplementasikan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul :

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011-2031 (Kajian Implementasi Kebijakan Larangan Mendirikan Bangunan di Sepanjang Sempadan Irigasi Kota Magelang)”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang?
2. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang menyebabkan kebijakan larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang belum dapat diimplementasikan dengan baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang implementasi kebijakan larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat apa saja yang menyebabkan kebijakan larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang belum dapat diimplementasikan dengan baik.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi input baik secara teoritis maupun praktis :

- 1.4.1 Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pemerintahan dan dapat digunakan sebagai pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik dalam lingkup perguruan tinggi.
- 1.4.2 Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi dan sumbang saran bagi pembuat kebijakan khususnya Pemerintah Kota Magelang.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Administrasi Publik

Menurut A. Dunsire (dalam Keban, 2008: 2) administrasi merupakan arahan, perintah, implementasi, pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual atau kelompok dalam rangka untuk menghasilkan barang dan jasa publik serta sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik. Sementara itu, Trecker (dalam Keban, 2008: 2) memiliki pendapat yang berbeda mengenai definisi administrasi, di mana menurutnya administrasi merupakan proses dinamis dan berkelanjutan yang digerakkan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan secara bersama antara orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama.

Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008: 3), mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu proses di mana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengelola berbagai keputusan yang terdapat dalam kebijakan publik. Sementara itu, Stillman II (dalam Keban, 2008: 5), mengungkapkan bahwa definisi mengenai administrasi publik sangat bervariasi dan sulit untuk diterima. Variasi tersebut dapat dilihat dari berbagai pendapat yang dikutip oleh Stillman II (dalam Keban, 2008: 5-6) sebagai berikut :

- (1) Dimock, Dimock, dan Fox mengungkapkan bahwa administrasi publik adalah produksi barang dan jasa yang direncanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (2) Barton dan Chappel mendefinisikan administrasi publik sebagai pekerjaan yang dijalankan oleh pemerintah. Maksudnya, ialah menekankan pada aspek keterlibatan personil pemerintah dalam melayani publik.
- (3) Menurut Starling, administrasi publik ialah semua yang dicapai oleh pemerintah atau dijalankan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan pada saat kampanye.
- (4) Nigro dan Nigro, mendefinisikan administrasi publik sebagai kerjasama kelompok dalam lingkungan publik, yang mencakup tiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Menurut Rosenbloom, administrasi publik merupakan pemanfaatan berbagai teori serta proses manajemen, politik, dan hukum guna memenuhi perintah dari pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam rangka melaksanakan fungsi dan pelayanan publik.
- (6) Menurut Nicholas Henry, administrasi publik merupakan kombinasi kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosikan pemahaman mengenai peran pemerintah dalam kaitannya dengan masyarakat, dan mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

1.5.2. Kebijakan Publik

Graycar (dalam Keban, 2008: 59) memandang kebijakan dari sudut pandang perspektif filosofis, produk, proses, dan kerangka kerja. Filosofis, artinya berupa suatu rangkaian prinsip, atau kondisi yang diharapkan. Produk, maksudnya yaitu suatu rangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Proses, artinya cara di mana melalui cara tersebut organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi harapan yakni terwujudnya suatu program dan langkah-langkah dalam mencapai produknya. Kerangka kerja, artinya yaitu kebijakan merupakan proses tawar menawar untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Menurut Carl Friedrich (dalam Indiahono, 2009: 18) kebijakan adalah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang di dalamnya terdapat berbagai hambatan di dalam mencapai tujuan, sehingga kemudian perlu mencari peluang yang ada untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Thomas R. Dye (dalam Indiahono, 2009: 17), mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan atau keputusan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Richard Rose (dalam Winarno, 2014: 20) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang saling berhubungan serta memiliki berbagai konsekuensi bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Kebijakan publik menurut James Anderson (dalam Winarno, 2014: 21), adalah tindakan yang ditetapkan oleh aktor kebijakan di mana tindakan

tersebut memiliki maksud dan tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Thomas R. Dye (dalam Winarno, 2014: 20) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala hal yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selanjutnya, Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008: 60) mendefinisikan kebijakan publik sebagai bentuk intervensi pemerintah yang ditujukan pada kelompok orang yang tidak berdaya di dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.

Pada umumnya, bentuk kebijakan dapat dibedakan atas (1) bentuk *regulatory* yaitu mengatur perilaku orang, (2) bentuk *redistributive* yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin, (3) bentuk *distributive* yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumberdaya tertentu, dan (4) bentuk *constituent* yaitu yang ditujukan untuk melindungi negara (Keban, 2008: 61).

Proses pembuatan kebijakan publik terbagi menjadi beberapa tahap. Tujuan pembagian tersebut yakni untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (dalam Winarno, 2014: 35-37) adalah sebagai berikut :

- 1) Tahap penyusunan agenda

Tahap ini merupakan tahap di mana para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya, berbagai masalah tersebut terlebih dahulu berkompetisi untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan hingga pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

2) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan, selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan. Berbagai masalah tersebut didefinisikan untuk dicari solusi terbaik. Solusi berasal dari berbagai alternatif yang ada.

3) Tahap adopsi kebijakan

Berbagai alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya hanya akan dipilih salah satu yang terbaik dan kemudian diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4) Tahap implementasi kebijakan

Program kebijakan hanya akan menjadi catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah dipilih sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

5) Tahap evaluasi kebijakan

Tahap ini merupakan tahap di mana kebijakan yang telah dijalankan atau diimplementasikan akan dinilai atau dievaluasi. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan persoalan yang ada. Oleh karena itu, perlu disusun suatu kriteria atau ukuran-ukuran yang berfungsi sebagai dasar

penilaian apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, tidak selamanya dapat berjalan dengan baik. Banyak kebijakan yang di dalam proses implementasinya menghadapi berbagai masalah. Hal tersebut karena implementasi merupakan suatu proses yang kompleks sehingga kemudian mendorong terjadinya berbagai masalah yang rumit. Selain itu, kebijakan juga seringkali tidak mendapat dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan maupun dari para pelaku kebijakan itu sendiri. Budi Winarno (2014: 214-219), mengemukakan enam tipe kebijakan yang memiliki potensi menimbulkan masalah antara lain yaitu :

- (1) Kebijakan-kebijakan baru.
- (2) Kebijakan yang didesentralisasikan.
- (3) Kebijakan kontroversial.
- (4) Kebijakan-kebijakan yang kompleks.
- (5) Kebijakan yang berhubungan dengan krisis.
- (6) Kebijakan yang ditetapkan oleh pengadilan.

1.5.3. Implementasi Kebijakan Publik

Sebelumnya telah disebutkan, bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Tahap implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting di dalam kebijakan karena tahap implementasi ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dapat diaplikasikan di lapangan dan berhasil untuk

menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan sebelumnya. *Output* merupakan keluaran langsung yang diharapkan dari kebijakan. Sementara itu, *outcomes* merupakan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif.

Lester dan Stewart (2000) (dalam Winarno, 2014: 147), implementasi adalah sebuah tahapan setelah suatu kebijakan ditetapkan melalui proses politik. Secara lebih luas, implementasi memiliki makna sebagai suatu tahap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan yang di dalamnya melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang saling bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan kebijakan atau program yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014: 148) merupakan kegiatan yang dilakukan setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Implementasi menyangkut berbagai tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor kebijakan agar program yang telah ditetapkan dapat berjalan. Kemudian, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) (dalam Wahab, 2014: 135-136) mendefinisikan implementasi sebagai hal yang terjadi setelah suatu program ditetapkan atau dengan kata lain peristiwa yang terjadi setelah ditetapkannya pedoman kebijakan publik yang mencakup usaha untuk mengadministrasikannya maupun menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Sementara itu, van Meter dan van Horn (dalam Winarno, 2014:

149) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik dari pemerintah maupun swasta yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan implementasi kebijakan ialah tindakan yang dilakukan oleh aktor kebijakan untuk melaksanakan program/kebijakan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran program yang diinginkan.

Menurut Gow dan Mors (dalam Keban, 2008: 78), implementasi kebijakan memiliki berbagai hambatan antara lain yaitu :

- (1) Hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan.
- (2) Kelemahan institusi.
- (3) Ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif.
- (4) Kekurangan dalam bantuan teknis.
- (5) Kurangnya desentralisasi dan partisipasi.
- (6) Pengaturan waktu (*timing*).
- (7) Sistem informasi yang kurang mendukung.
- (8) Perbedaan agenda tujuan antara aktor.
- (9) Dukungan yang berkesinambungan.

1.5.4. Model-Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan memiliki beberapa macam model. Model implementasi kebijakan menurut van Meter dan van Horn (dalam

Indiahono, 2009: 38-39) terdapat tujuh variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Tujuh variabel tersebut yaitu :

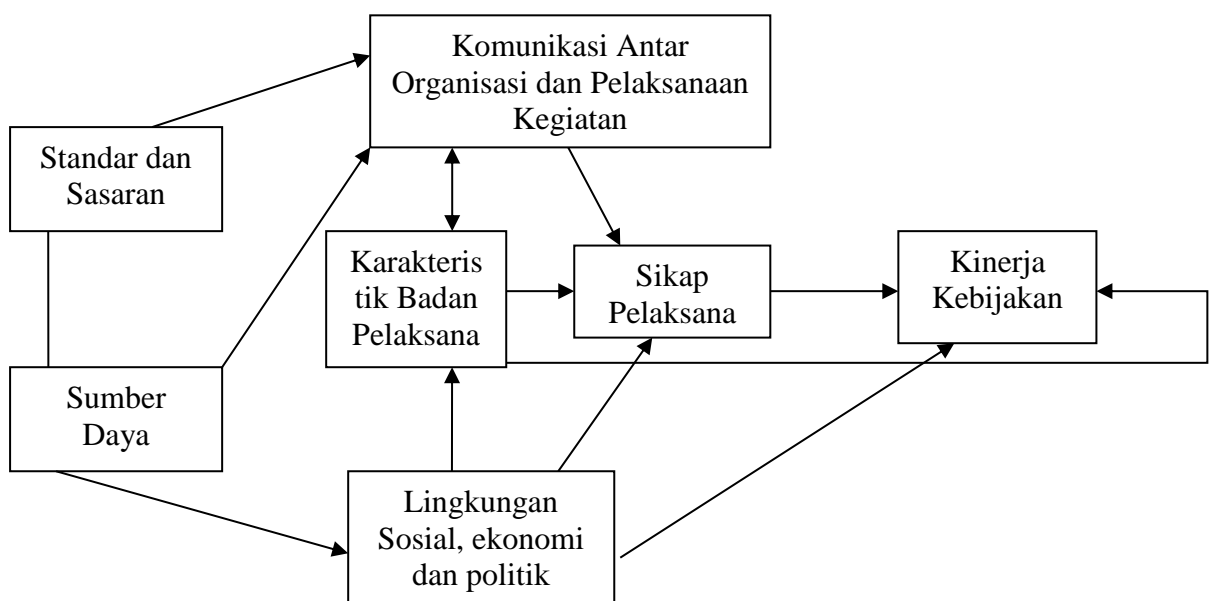
- a) Standar dan sasaran kebijakan, merupakan hal yang ingin dicapai dari suatu kebijakan/program. Sasaran kebijakan harus jelas agar dapat dilihat secara spesifik sehingga pada akhir program dapat diketahui apakah program tersebut berhasil atau gagal.
- b) Kinerja kebijakan, adalah penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Sumber daya, mengarah pada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan /program.
- d) Komunikasi antar badan pelaksana, mengarah pada mekanisme prosedur yang diumumkan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan dari program.
- e) Karakteristik badan pelaksana, mengarah pada seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
- f) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, mengandung makna bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Variabel ini meliputi sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung kesuksesan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok kepentingan mendukung implementasi kebijakan; karakteristik partisipan, yaitu mendukung atau menolak; bagaimana opini publik yang berada di

lingkungan; dan apakah elite politik memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan.

- g) Sikap pelaksana, merupakan variabel penting di dalam implementasi kebijakan. Sikap pelaksana yang sebaiknya dimiliki yaitu seperti sikap demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan.

Adapun model van Meter dan van Horn dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 1.1. Model Implementasi Kebijakan – Van Meter dan Van Horn



Sumber : Van Meter and Horn (1975: 463) dalam Indiahono (2009: 40)

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) (dalam Subarsono, 2013: 94-99), mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu karakteristik masalah; karakteristik kebijakan/undang-undang; dan variabel lingkungan kebijakan.

1) Karakteristik masalah:

- a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Pada satu sisi terdapat masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum, namun pada sisi lain terdapat masalah sosial yang cenderung sulit dipecahkan, seperti kemiskinan. Oleh karena itu, sifat masalah tersebut yang akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.
- b. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Artinya, suatu program akan cenderung mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi kebijakan akan cenderung sulit karena mereka memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda.
- c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Kebijakan/program akan mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasaran tidak terlalu besar.
- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Kebijakan/program yang bertujuan memberikan pengetahuan akan cenderung lebih mudah diimplementasikan daripada kebijakan/program yang bertujuan untuk merubah sikap serta perilaku suatu masyarakat.

2) Karakteristik kebijakan/undang-undang:

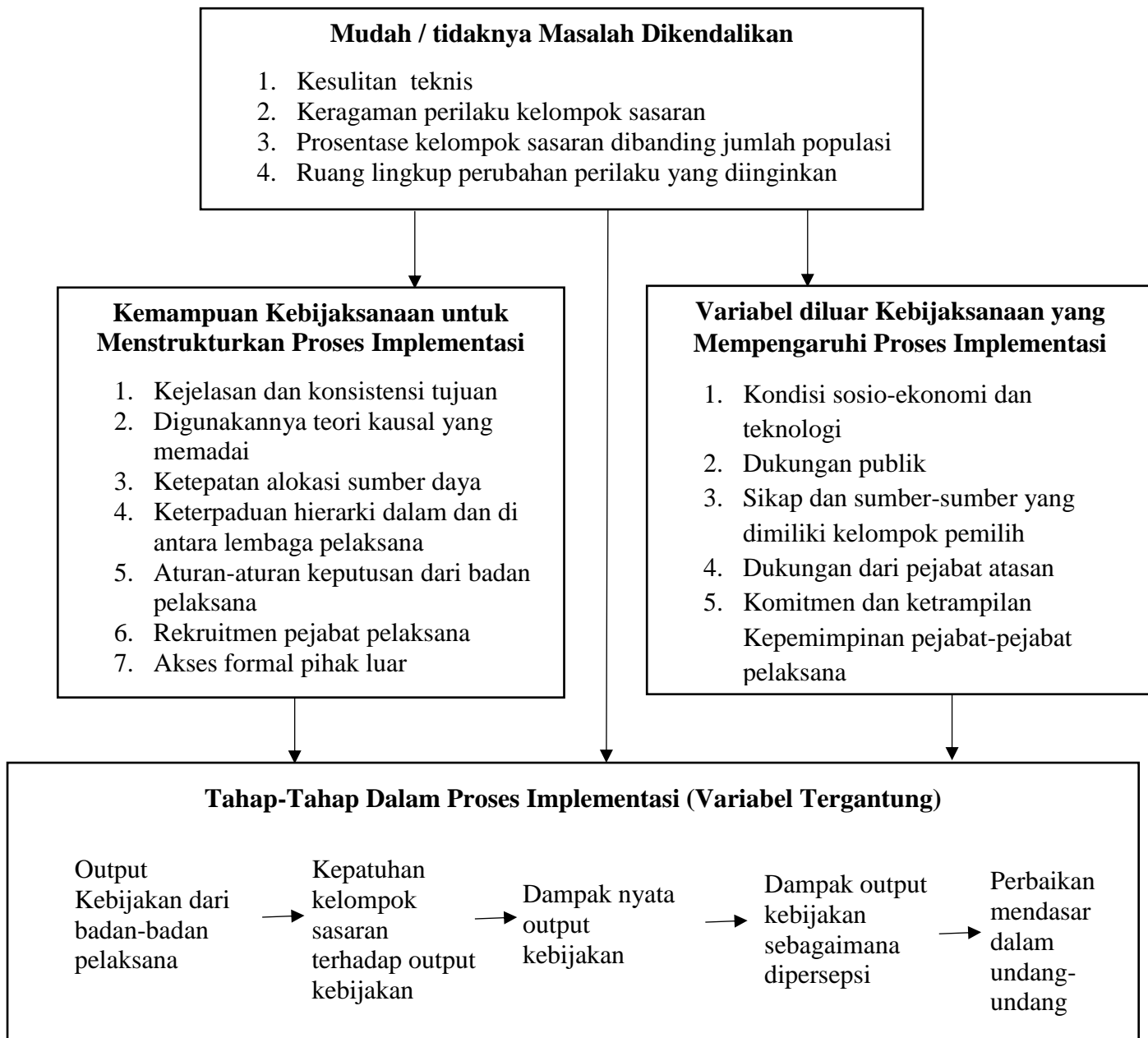
- a. Kejelasan isi kebijakan. semakin jelas dan rinci isi suatu kebijakan, maka akan semakin mudah untuk diimplementasikan.

- b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis. Kebijakan yang memiliki dasar teoretis bersifat lebih mantap karena telah teruji.
 - c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumberdaya keuangan menjadi faktor penting bagi setiap program sosial.
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Penyebab kegagalan program sering disebabkan karena kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antarinstansi yang terlibat.
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
 - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang memberi peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat cenderung mendapat dukungan daripada kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat.
- 3) Variabel lingkungan kebijakan:
- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat serta tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik cenderung mudah menerima program pembaruan. Kemajuan teknologi juga akan membantu proses keberhasilan implementasi program.

- b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang bersifat memberikan insentif, umumnya mudah mendapat dukungan dari publik.
- c. Sikap kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui cara-cara seperti: (1) melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat oleh badan pelaksana melalui berbagai komentar; (2) mempengaruhi badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan.
- d. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Komitmen para aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah termuat dalam kebijakan menjadi variabel paling penting. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam menentukan prioritas tujuan dan kemudian merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Adapun model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 1.2. Model Implementasi Kebijakan – Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

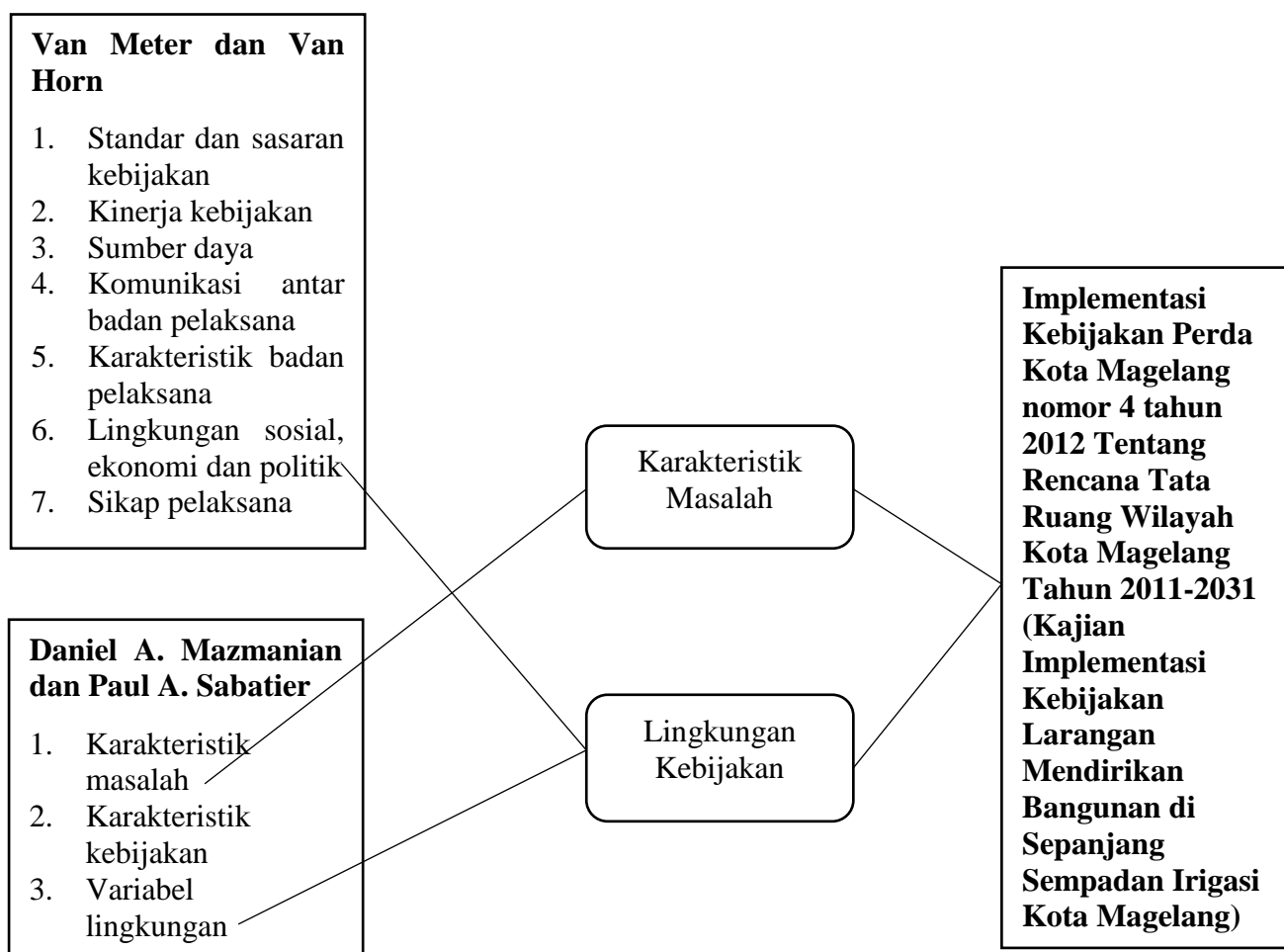


Sumber : Mazmanian, Daniel A dan Sabatier, Paul A, (1983: 22) dalam Subarsono (2013: 95)

1.5.5. Kerangka Pikir

Secara sistematis kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 1.3
Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Van Meter and Horn, 1975: 463 dalam Indiahono (2009: 40) dan Mazmanian, Daniel A dan Sabatier, Paul A, 1983: 22 dalam Subarsono (2013: 95)

1.6 Operasionalisasi Konsep

Secara konseptual penelitian ini merupakan Implementasi Perda Kota Magelang No 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 yang difokuskan pada Kajian Implementasi Kebijakan Larangan Mendirikan Bangunan di Sepanjang Sempadan Irigasi Kota Magelang. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan mengenai bagaimana Implementasi Larangan Mendirikan Bangunan di Sepanjang Sempadan Irigasi Kota Magelang dan mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat dalam Implementasi Larangan Mendirikan Bangunan di Sepanjang Sempadan Irigasi Kota Magelang sehingga belum dapat berjalan dengan baik dengan melihat data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Perwakilan Balai Wilayah Progo yang menunjukkan masih banyaknya bangunan-bangunan milik warga yang menempati sempadan irigasi Kota Magelang.

Fenomena dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi Perda Kota Magelang nomor 4 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Kajian Implementasi Kebijakan Larangan Mendirikan Bangunan di Sepanjang Sempadan Irigasi Kota Magelang).

Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh aktor kebijakan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Berdasarkan Perda Kota Magelang nomor 4 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Magelang Tahun 2011-2031 pada pasal 48 ayat (5) huruf b mengatur bahwa bangunan di sepanjang sempadan irigasi yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan irigasi tidak diijinkan untuk didirikan. Pasal 84 ayat (1) huruf e juga mengatur mengenai ketentuan umum kegiatan kawasan perlindungan setempat yang berupa sempadan irigasi, dimana bangunan selain fasilitas infrastruktur tertentu/perkotaan dan RTH; jalan inspeksi dan lalu lintas umum; penunjang fungsi taman rekreasi dan RTH; dan bangunan irigasi dilarang untuk didirikan. Kemudian, dalam Pasal 107 ayat (2) menerangkan bahwa pelanggaran yang berupa pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota akan diberi sanksi administratif berupa : (a) peringatan tertulis; (b) penghentian sementara kegiatan; (c) penghentian sementara pelayanan umum; (d) penutupan lokasi; (e) pembongkaran bangunan; (f) pemulihan fungsi ruang; dan (g) denda administratif. Adapun gejala yang diamati adalah :

- 1) Jenis bangunan yang menempati sempadan irigasi.
- 2) Kepemilikan bangunan warga yang menempati wilayah sempadan irigasi.
- 3) Sanksi bagi masyarakat yang masih mendirikan bangunan di sempadan irigasi.

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang

Faktor pendukung implementasi kebijakan adalah hal atau kondisi yang dapat mendorong terlaksananya implementasi kebijakan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor penghambat implementasi kebijakan adalah hal atau kondisi yang dapat menjadi penghalang atau rintangan bagi terlaksananya implementasi kebijakan sehingga sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sub gejala yang diamati adalah :

1. Karakteristik masalah, adapun gejala yang diamati adalah :
 - a. Tingkat kesulitan teknis
 - b. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran
2. Lingkungan kebijakan, adapun gejala yang diamati adalah :
 - a. Kondisi sosial ekonomi
 - b. Dukungan dari kelompok kepentingan
 - c. Sikap kelompok pemilih
 - d. Sifat opini publik

1.7 Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang digunakan setiap peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian diarahkan guna mencapai kebenaran ilmiah. Metode penelitian adalah cara ilmiah guna memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu (Sugiyono, 2009: 2).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif menekankan untuk memahami tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleong, 2007: 6). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Kajian Implementasi Kebijakan Larangan Mendirikan Bangunan di Sepanjang Sempadan Irigasi Kota Magelang).

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian deskriptif. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan Implementasi Kebijakan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Kajian Implementasi Kebijakan Larangan Mendirikan Bangunan di Sepanjang Sempadan Irigasi Kota Magelang) di lapangan, mengetahui sifat-sifat individu para implementor, keadaan gejala-gejala dari kelompok tertentu dalam objek penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status variabel, gejala, atau keadaan yang ada, yaitu keadaan apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian menetapkan wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Wilayah yang diambil adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Perwakilan Balai Wilayah Progo, Satpol PP Kota Magelang, dan wilayah sempadan irigasi Kota Magelang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang dipilih menjadi wilayah penelitian karena merupakan instansi yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum dan tata ruang wilayah daerah Kota Magelang dan juga merupakan instansi yang berwenang dalam mengelola saluran Kali Kota sebagai saluran irigasi sekunder. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Perwakilan Balai Wilayah Progo juga dipilih karena merupakan instansi yang berwenang dalam mengelola saluran irigasi Kali Bening dan Kali Manggis Kota Magelang sebagai saluran irigasi primer. Satpol PP Kota Magelang dipilih menjadi wilayah penelitian karena Satpol PP memiliki tanggung jawab dibidang penegakan perda khususnya sebagai pihak yang melaksanakan penggusuran bangunan-bangunan yang menempati wilayah yang tidak seharusnya. Wilayah sempadan irigasi Kota Magelang juga dipilih karena merupakan lokasi terjadinya pelanggaran.

1.7.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono,

2009: 218-219). Penelitian ini membutuhkan beberapa narasumber atau informan. Informan tersebut yang dapat dipercaya serta memiliki wawasan dan pandangan yang luas mengenai kebijakan tata ruang wilayah Kota Magelang khususnya larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang.

Subyek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan oleh peneliti untuk dapat memberikan informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti atau dengan kata lain disebut dengan informan. Pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang. Masyarakat yang tinggal di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang dipilih karena mereka melanggar peraturan yang telah dibuat dengan mendirikan bangunan-bangunan di wilayah dimana seharusnya tidak untuk didirikan bangunan. Pemilihan informan pada masyarakat dengan menggunakan *random sampling*, dimana informan dipilih secara acak.
- 2) Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang yang meliputi Kepala Bidang Penataan Ruang, Kepala Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang, Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, dan Kepala Seksi Pengairan Bidang Bina Marga dan Pengairan. Subyek ini dipilih karena dianggap paling mengetahui dan memahami secara detail mengenai Perda No. 4 Tahun

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031.

- 3) Koordinator Pengelola Wilayah Progo. Informan ini dipilih karena dianggap yang paling mengetahui mengenai pelanggaran di sempadan irigasi primer yaitu Kali Manggis dan Kali Bening yang melintas di Kota Magelang.
- 4) Kepala Satpol PP Kota Magelang. Kepala Satpol PP Kota Magelang dimasukkan dalam daftar informan wawancara karena memiliki tanggung jawab dalam hal penegakan perda khususnya pengurusan bangunan-bangunan yang melanggar peraturan.

1.7.4 Jenis Data

Penelitian kualitatif menggunakan data berupa: teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang menggambarkan atau mempresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan, dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial.

1.7.5 Sumber Data

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Kajian Implementasi Kebijakan Larangan Mendirikan Bangunan di Sepanjang Sempadan Irigasi Kota Magelang) memperoleh sumber data:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data-data yang diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan dalam wawancara atau

pengamatan langsung/observasi. Pada penelitian ini, data primer yang digunakan berasal dari pihak pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, Koordinator Pengelola Wilayah Progo, Kepala Satpol PP Kota Magelang, dan dari masyarakat. Kemudian data yang diperoleh bisa dicatat atau direkam.

2. Data sekunder adalah catatan mengenai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi berupa tulisan dari buku, dokumen, internet dan sumber-sumber tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data sekunder peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang mendukung mengenai Implementasi Kebijakan Perda No. 4 Tahun 2012.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. Penulis menggunakan tipe wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2009: 140).

b. Observasi

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, penulis menggunakan tipe observasi non-partisipan (*Non-Participant Observation*).

Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini tidak memperoleh data yang mendalam dan tidak sampai pada tahap tingkat makna. Pada pengumpulan data observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku masyarakat yang sedang diamati. Dari segi instrumen yang digunakan, penulis menggunakan tipe observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis mengenai apa yang akan diobservasi. Hal tersebut karena peneliti tidak mengetahui secara pasti mengenai apa yang akan diamati. Dalam melakukan penelitian, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, namun hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Disini peneliti melakukan penelitian langsung di wilayah sempadan irigasi Kota Magelang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Herdiansyah, 2011: 143). Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang berupa data-data berupa gambar, dokumen resmi, data-data resmi yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang serta Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Perwakilan Balai Wilayah Progo.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Rangkaian analisis dalam (Miles dan Huberman, 2014) hampir sama dengan metode etnografi, dengan beberapa teknik yang dipinjam dari dasar teori. Rangkaian analisis ini bergerak dari satu kesimpulan induktif ke kesimpulan yang lain dengan mengumpulkan data secara selektif, membandingkan materi dalam menentukan pola atau keteraturan, mencari lebih banyak data untuk mendukung atau memenuhi syarat kelompok-kelompok yang muncul, dan kemudian secara bertahap menarik kesimpulan dari hubungan antara bagian data baru yang lain dan kumpulan konseptualisasi kumulatif.

Terdapat beberapa praktik analisis yang dapat digunakan dalam berbagai jenis penelitian kualitatif. Berikut adalah rangkaian tahapan analisis yang cukup klasik yang disusun secara berurutan dalam (Miles dan Huberman, 2014) :

1. Menetapkan kode atau tema ke catatan lapangan, transkrip wawancara, atau dokumen
2. Memilah dan menyaring bahan berkode ini untuk mengidentifikasi frasa yang serupa, hubungan antara variabel, pola, tema, kategori, perbedaan yang jelas antara subkelompok, dan urutan umum
3. Mengisolasi pola dan proses ini, dan persamaan dan perbedaan, dan membawa ke lapangan pada gelombang pengumpulan data berikutnya
4. Memperhatikan refleksi atau ucapan lain dalam catatan, jurnal, dan memo analisis

5. Secara bertahap menguraikan serangkaian pernyataan, proposisi, dan generalisasi yang mencakup konsistensi yang terlihat dalam database
6. Membandingkan generalisasi tersebut dengan pengetahuan formal dalam bentuk konstruksi atau teori

Analisis data kualitatif didasarkan pada pengamatan, wawancara, dokumen, dan artefak. Kegiatan pengumpulan data ini biasanya dilakukan di lokasi yang berdekatan untuk jangka waktu yang berkelanjutan. Data semacam itu biasanya tidak mudah diakses untuk dianalisis namun memerlukan beberapa jenis pengolahan: Catatan lapangan mentah perlu diperluas dan diketik, rekaman suara perlu ditranskrip dan dikoreksi, dan foto perlu didokumentasikan dan dianalisis.

Miles dan Huberman melihat analisis sebagai tiga arus aktivitas bersamaan: (1) kondensasi data, (2) tampilan data, dan (3) menggambarkan kesimpulan / verifikasi.

1) Kondensasi Data

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, penguraian, dan / atau transformasi data yang muncul secara utuh dari catatan tertulis lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Dengan kondensasi, kita membuat data lebih kuat. Kondensasi data adalah bentuk analisis yang mempertajam, memilah, memfokuskan,

membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan "akhir" dapat ditarik dan diverifikasi.

2) Tampilan Data

Secara umum, tampilan adalah kumpulan informasi terkelola dan terorganisir yang memungkinkan pengambilan gambar dan tindakan. Dengan melihat tampilan akan membantu kita memahami apa yang sedang terjadi dan melakukan sesuatu - baik menganalisis lebih jauh atau mengambil tindakan - berdasarkan pemahaman tersebut.

3) Menggambarkan dan Memeriksa Kesimpulan

Kegiatan analisis yang ketiga adalah kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan mencatat pola, penjelasan, arus sebab-akibat dan proposisi. Peneliti yang kompeten memegang kesimpulan ini dengan mudah, mempertahankan keterbukaan dan keraguan, namun kesimpulannya masih ada, samar pada awalnya, kemudian semakin jelas dan beralasan. Kesimpulan "Final" mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran catatan lapangan; metode pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan yang digunakan; kecanggihan peneliti; dan tenggat waktu yang perlu dipenuhi.

Kesimpulan juga diverifikasi sebagai hasil analisis. Verifikasi mungkin sesingkat pikiran kedua yang sekilas melintas di benak analisis saat menulis, dengan melihat catatan lapangan secara singkat; atau

mungkin secara menyeluruh dan terperinci, dengan argumentasi dan ulasan yang panjang di antara rekan kerja untuk mengembangkan "konsensus intersubjektif" atau dengan upaya ekstensif untuk meniru temuan di kumpulan data lain. Makna yang muncul dari data harus diuji agar masuk akal, kokoh, diakui, artinya keabsahannya. Jika tidak, kita ditinggalkan dengan cerita yang menarik tentang apa yang terjadi tapi kebenaran dan utilitas tidak diketahui.

1.7.8 Kualitas Data

Penelitian kualitatif harus memiliki standar kredibilitas. Standar kredibilitas tersebut guna menunjukkan bahwa hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan (informasi yang digali dari subyek atau partisipan yang diteliti). Cara memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian, yaitu dengan triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Sugiyono, 2009: 241).

Penelitian kualitatif ini menggunakan triangulasi teknik. Hal ini berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2009: 241). Peneliti menggunakan pengumpulan data dengan menggabungkan wawancara terstruktur, dan dokumentasi dari penelitian yang ada di lapangan.